

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim menjadi ancaman yang nyata dalam berbagai aspek kehidupan. Bukan hanya mempengaruhi lingkungan, perubahan iklim telah berubah menjadi salah satu isu *high politics* yang juga bisa mempengaruhi politik, ekonomi, pembangunan, bahkan dapat mempengaruhi eksistensi suatu negara, terutama negara kepulauan.¹

Salah satu negara yang menerima dampak terbesar perubahan iklim adalah Republik Kepulauan Marshall. Republik Kepulauan Marshall merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di kawasan Pasifik dengan dua rantai kepulauan dengan total 29 pulau karang, masing-masing terdiri dari pulau-pulau kecil dan lima pulau tunggal.² Republik Kepulauan Marshall memiliki luas 181 km² dan berbatasan dengan Negara Federasi Mikronesia di sebelah barat dan Nauru di sebelah barat daya.³ Dampak terbesar dari perubahan iklim yang diterima Negara Republik Kepulauan Marshall ialah naiknya permukaan air hingga menimbulkan banjir besar di daerah-daerah utama Republik Kepulauan Marshall, seperti ibukota Republik Kepulauan Marshall, Majuro.⁴ Lebih jauh, banjir yang berasal kenaikan permukaan air laut turut merusak pertanian akibat dari masuknya air laut kedalam

¹ Cecilie Brein, "Does The Dividing Line Between 'High' and 'Low' Politics Mark The Limits of European Integration? -The Case of Justice and Home Affairs," GRA5912 European Union Politics, February 2008, (Diakses pada 8 Februari 2019)

² Central Intelligence Agency, "The World Factbook: Marshall Islands," <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rm.html> (Diakses pada 3 Desember 2018)

³ Central Intelligence Agency, "The World Factbook: Marshall Islands"

⁴ Carol Davenport, "The Marshall Islands Are Disappearing," *The New York Times*, December 02, 2015, <https://www.nytimes.com/interactive/2015/12/02/world/The-Marshall-Islands-Are-Disappearing.html>, diakses pada 30 November 2017

tanah yang membuat tanah pertanian di sebagian besar wilayah Kepulauan Marshall rusak dan tidak layak untuk ditanami.⁵ Hal ini berakibat pada menipisnya persediaan pangan yang sebelumnya banyak diperoleh dari pertanian dan mengancam ketahanan pangan negara tersebut.

Dampak lainnya yang diterima oleh Kepulauan Marshall sebagai akibat dari perubahan iklim adalah ketika air laut yang mulai menjalar masuk ke daerah daratan⁶ Gelombang air laut yang masuk dan mulai menjalar ke daratan tersebut membuat persediaan air tawar yang ada di negara tersebut turut tersapu oleh air laut. Persediaan air tawar yang mulai menipis menjadi ancaman bagi penduduk Kepulauan Marshall yang kekurangan air bersih untuk diminum dan digunakan dalam keperluan sehari-hari.

Dampak tersebut memaksa Negara Republik Kepulauan Marshall untuk bertindak melawan perubahan iklim itu sendiri yang mana apabila tidak dilakukan, maka permukaan air akan terus meningkat. Permukaan air yang terus meningkat ini dapat menenggelamkan dan mengancam eksistensi Republik Kepulauan Marshall. Salah satu upaya yang tengah dilaksanakan oleh Kepulauan Marshall adalah dengan menyampaikan kepentingannya di forum perubahan iklim dunia, yaitu dimulai sejak *United Nations Climate Change Conference* pada tahun 2009 di Copenhagen, Denmark dan di *United Nations Climate Change Conference* tahun 2015 di Paris,

⁵ Renee Lewis, "Disaster After Disaster Hits Marshall Islands as Climate Change Kicks In," *Al-Jazeera America*, May 18, 2015, <http://america.aljazeera.com/articles/2015/5/18/disaster-after-disaster-in-low-lying-marshall-islands.html>, diakses pada 30 November 2017

⁶ Michael Greshko, "Within Decades, Floods May Render Many Islands Uninhabitable," *National Geographic News*, April 25, 2018, <https://news.nationalgeographic.com/2018/04/marshall-islands-climate-change-floods-waves-environment-science-spd/>, diakses pada 15 September 2018.

Perancis yang diselenggarakan oleh *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC).

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sebagai rezim perubahan iklim telah berupaya untuk menekan peningkatan perubahan iklim yang ditimbulkan dari emisi gas karbon dan efek rumah kaca. Salah satu peranan yang dilakukan oleh UNFCCC adalah dengan menyelenggarakan Konferensi Perubahan Iklim PBB 2015 yang bertujuan untuk membahas Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*). Tujuan utama dari *United Nations Climate Change Conference* di Paris pada tahun 2015 adalah untuk mencapai kestabilan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkatan yang dapat mencegah bahaya gangguan antropogenik pada sistem iklim yang harus dicapai dalam jangka waktu yang dapat membiarkan ekosistem beradaptasi secara alami terhadap perubahan agar dapat dipastikan bahwa produksi bahan makanan tidak akan terancam.⁷

Konferensi Perubahan Iklim PBB 2015 dihadiri oleh 197 negara yang telah menandatangani Kesepakatan Paris. Dari 197 negara yang hadir dan menandatangani kesepakatan paris, 170 negara diantaranya telah meratifikasi. Republik Kepulauan Marshall merupakan salah satu dari beberapa negara yang pertama kali meratifikasi kesepakatan Paris.⁸

⁷ United Nations Framework Convention on Climate Change, "Parties and Observers," http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/877.pdf. (Diakses pada 20 Mei 2018)

⁸ Paris Agreement Signatory and Ratification Status, http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php , (Diakses pada 1 Desember 2017)

Diplomasi menjadi suatu bentuk *soft-power* yang lebih dipilih untuk dijalankan guna menyampaikan kepentingan-kepentingan tertentu oleh aktor-aktor internasional.⁹ Setiap negara, yang dipercaya sebagai aktor utama dalam hubungan internasional diharuskan memiliki kemampuan diplomasi yang kuat untuk mempertahankan dan menyampaikan kepentingannya dalam politik internasional. Namun bagi beberapa negara yang tidak memiliki kekuatan diplomatik yang besar, kepentingan mereka terancam tak bisa didengar, atau bahkan tak bisa disampaikan. Isu-isu yang dibawa ke ranah diplomatik bukan lagi hanya sekedar isu-isu utama, seperti keamanan, ekonomi, stabilitas keamanan, atau hukum. Salah satu isu yang banyak dibawa ke ranah Hubungan Internasional saat ini adalah isu Perubahan Iklim.

Dalam kasus ini, sebuah NGO berbasis *diplomatic advisory group* bernama Independent Diplomat hadir dalam upayanya untuk mengadvokasi Republik Kepulauan Marshall untuk mencapai kepentingannya di forum yang membahas tentang perubahan iklim global, yakni *United Nations Climate Change Conference* di Paris pada tahun 2015 lalu. Independent Diplomat merupakan sebuah lembaga non-profit yang terdiri dari para mantan diplomat dan advokat internasional, praktisi, dan pakar hubungan internasional. Independent diplomat didirikan pada tahun 2004 oleh seorang mantan diplomat Inggris, Carne Ross.¹⁰ Tujuan utama Independent Diplomat adalah untuk menyediakan jasa nasihat diplomatik bagi

⁹ Joseph S. Nye, Jr., "Public Diplomacy and Soft Power," *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, volume 616 (Public Diplomacy in A Changing World) Maret 2008

¹⁰ Independent Diplomat, "About US," <http://independentdiplomat.org/about-us/> (diakses pada 12 Februari 2018)

pemerintah, organisasi, hingga pihak-pihak lain yang membutuhkan bantuan saran-saran diplomatis.

Independent Diplomat mulai mengadvokasi Republik Kepulauan Marshall dalam masalah perubahan iklim pada tahun 2009 dalam menghadapi Copenhagen Climate Conference setelah Kepulauan Marshall meminta bantuan kepada Independent Diplomat.¹¹ Sebagai negara yang rentan terhadap perubahan iklim dan telah merasakan dampak yang besar dari perubahan iklim, konferensi-konferensi perubahan iklim merupakan ajang yang tepat untuk menyampaikan kepentingan nasional Kepulauan Marshall dalam menanggulangi perubahan iklim dunia yang akibatnya amat besar dirasakan oleh Republik Kepulauan Marshall. Tujuannya tidak lain merupakan agar diadopsinya suatu kesepakatan yang dapat mengikat anggotanya untuk secara konsisten turut berpartisipasi dalam usaha menahan laju peningkatan suhu global hingga di bawah 2 derajat celcius dari angka sebelum masa revolusi industri, dan mencapai upaya dalam membatasi perubahan temperatur hingga setidaknya 1.5 derajat Celcius, karena memahami bahwa pembatasan ini akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak dari perubahan iklim sehingga Republik Kepulauan Marshall tidak mengalami peningkatan permukaan air yang signifikan dalam jangka waktu tersebut.¹²

Kepentingan Kepulauan Marshall di forum Internasional terhalang oleh posisi negara-negara maju yang berstatus sebagai negara Annex 1. Apabila pengadopsian kesepakatan Paris terwujud, maka hal ini akan memaksa negara-negara Annex 1 untuk mengurangi tingkat emisi gas karbon yang dihasilkan oleh

¹¹ Independent Diplomat, "Independent Diplomat Annual Report: Year of 2016," Hal.6

¹² Independent Diplomat, "Independent Diplomat Annual Report: Year of 2015," Hal 10

industri-industri. Dengan demikian, negara-negara Annex 1 harus mengurangi tingkat emisi gas karbon dengan cara mereduksi proses industri.¹³

Kepulauan Marshall memainkan peran penting setelah dalam proses advokasi dari Independent Diplomat dalam proses negosiasi di Konferensi Perubahan Iklim ini dengan menjadi sorotan sebagai negara kecil yang menjadi blok negosiasi negara-negara kepulauan kecil seperti Kiribati, Bahamas, dan Maladewa.¹⁴ Republik Kepulauan Marshall menjadi sorotan karena perbedaan cara negosiasi yang dilakukan antara saat Konferensi Perubahan Iklim PBB 2009 di Kopenhagen dan saat Konferensi Perubahan Iklim PBB tahun 2015 di Paris. Tujuan utama negara-negara kecil yang menerima dampak besar perubahan iklim di Konferensi Perubahan Iklim 2009 di Kopenhagen adalah dengan menuntut negara-negara besar penghasil emisi gas karbon utama dunia untuk memberikan ganti rugi berbentuk materi setara dengan kerugian akibat kerusakan yang terjadi di negara mereka.¹⁵ Di Konferensi Perubahan Iklim 2015 Paris, Kepulauan Marshall memilih pendekatan yang lebih baik dengan cara diplomatis.

Salah satu peran besar Republik Kepulauan Marshall dalam usahanya untuk menangkal perubahan iklim adalah dengan membentuk *High Ambition Coalition* antara negara-negara yang menerima akibat terbesar dari perubahan iklim dan menjadi *leading voice* diantara 100 negara anggota *High Ambition Coalition* tersebut.¹⁶ *High Ambition Coalition* sendiri merupakan sebuah koalisi yang terdiri

¹³ Independent Diplomat, "Independent Diplomat Annual Report: Year of 2015," Hal 10

¹⁴ Jeff Goodell, "Will The Paris Climate Deal Save The World?," *The Rolling Stone*, 13 Januari 2016, <https://www.rollingstone.com/culture/culture-news/will-the-paris-climate-deal-save-the-world-56071/> (Diakses pada 4 Oktober 2018)

¹⁵ Jeff Goodell, "Will The Paris Climate Deal Save The World?"

¹⁶ Independent Diplomat, "Tackling Climate Change Republic of The Marshall Island," <https://independentdiplomat.org/project/rmi-climate-change/> (diakses pada 13 November 2017)

dari 195 negara yang dibentuk secara rahasia dari hasil pertemuan informal 15 Menteri Luar Negeri enam bulan sebelum pertemuan resmi di Paris pada Konferensi Perubahan Iklim 2015. Tujuan dari High Ambition Coalition sendiri memiliki empat isu kunci, yaitu untuk memastikan Kesepakatan Paris mengikat secara hukum; untuk menetapkan tujuan jangka panjang yang jelas tentang pemanasan global yang sejalan dengan saran-saran ilmiah; untuk memperkenalkan mekanisme yang melakukan peninjauan kembali atas komitmen emisi negara-negara setiap lima tahun; dan untuk menciptakan sistem terpadu dalam melacak perkembangan negara-negara dalam memenuhi target emisi gas karbonnya.

Berdasarkan hal tersebut, terutama dengan terjadinya perubahan iklim yang memberikan dampak yang sangat besar pada Republik Kepulauan Marshall dan keterlibatan Independent Diplomat dalam mengadvokasikan diplomasi Republik Kepulauan Marshall, muncul ketertarikan peneliti untuk membahas strategi yang digunakan oleh Independent Diplomat sebagai NGO dalam proses advokasi terhadap diplomasi Republik Kepulauan Marshall di United Nations Climate Change Conference 2015

1.2 Rumusan Masalah

Independent Diplomat hadir sebagai *Diplomatic Advisory Group* yang membantu Negara Republik Kepulauan Marshall dalam menangkal perubahan iklim yang berdampak amat besar bagi negara tersebut. Dampaknya, Republik Kepulauan Marshall menjadi *leading country* dalam menyuarakan tentang perubahan iklim diantara negara-negara yang terletak di kawasan Pasifik. Dalam masalah ini, penting untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh Independent Diplomat dalam mengadvokasi Negara Republik Kepulauan Marshall sehingga

dapat membentuk High Ambition Coalition di Konferensi Perubahan Iklim 2015 di Paris.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti mencoba menjawab pertanyaan bagaimana strategi Independent Diplomat dalam mengadvokasi proses diplomasi Republik Kepulauan Marshall di Konferensi Perubahan Iklim PBB 2015?”

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dijabarkan dalam penelitian ini adalah menganalisis strategi Independent Diplomat dalam mengadvokasi diplomasi Republik Kepulauan Marshall di 2015 United Nations Climate Change Conference.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk menganalisis strategi sebuah NGO terlibat dalam diplomasi sebuah negara untuk membantu mewujudkan kepentingan negara tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur kajian Hubungan Internasional terkait isu yang dibahas, khususnya tentang Diplomasi.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam menganalisis penelitian yang diangkat, peneliti mencoba menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian sebelumnya maupun penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti menjadi tolak ukur dan landasan bagi peneliti untuk mengembangkan penelitian ini. Adapun beberapa kajian pustaka yang dijadikan rujukan, yaitu:

Pertama, peneliti menggunakan artikel jurnal berjudul “Titanic States? Impacts and Responses to Climate Change in The Pacific Islands” oleh John

Barnett¹⁷. Dampak dari perubahan iklim amat terasa di wilayah bumi bagian Pasifik. Negara-negara yang terletak di kawasan Pasifik harus menanggung beban yang sangat besar dari perubahan iklim. Naiknya permukaan air mengakibatkan banjir besar dan gelombang besar yang menyapu wilayah pantai di negara-negara tersebut. Faktanya, pihak yang paling banyak menerima dampak buruk dari perubahan iklim adalah yang kurang beruntung ekonominya. Hal ini terbukti dari wilayah negara-negara pasifik yang terkena dampak banjir air laut yang merusak tanah perkebunan dan pertanian mereka. Hal ini menambah daftar masalah, termasuk dalam masalah keamanan pangan negara-negara pasifik.

Dampak lainnya ialah setelah naiknya permukaan air, banyak warga yang tinggal di pinggir laut di negara-negara Pasifik mulai melakukan urbanisasi ke daerah kota utama yang letaknya agak jauh dari daerah pinggir laut. Hal ini membuat perekonomian negara tersebut semakin tak tertentu.

Kedua, peneliti menggunakan literatur berupa bab ketujuh dari buku yang berjudul “Diplomacy and the Making of World Politics” dengan judul bab yaitu “Diplomacy as Economic Consultancy” yang ditulis oleh Leonard Seabrooke.¹⁸ Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana diplomasi bisa bekerja dengan bantuan konsultasi ekonomi. Tulisan ini berfokus menjelaskan tentang bagaimana dalam diplomasi terdapat para profesional yang bekerja sebagai pihak ketiga yang memberikan konsultasi ekonomi. Dalam tulisan ini, para profesional tersebut disebut sebagai *broker*. Independent Diplomat disebut sebagai salah satu *broker*

¹⁷ John Barnett, “Titanic States? Impacts and Responses to Climate Change in The Pacific Islands,” *Journal of International Affairs* vol 59 no.1, Fall 2005, Hal. 43

¹⁸ Leonard Seabrooke, “Diplomacy as Economic Consultancy,” in *Diplomacy and The Making of World Politics*, ed. Ole Jacob Sending (Cambridge: Cambridge University Press, 2015) Hal. 195-219

dalam dunia diplomasi yang menyediakan jasa konsultasi ekonomi, nasihat diplomatik, hingga advokasi dalam bidang diplomasi. Tulisan ini menggambarkan bentuk advokasi yang dilakukan oleh Independent Diplomat dari kasus-kasus yang sebelumnya. Kasus-kasus tersebut antara lain menjadi penasihat bagi Kosovo dalam proses meraih kemerdekaan Kosovo. Kasus lain antara lain saat Independent Diplomat bekerja dengan menjadi penasihat bagi POLISARIO Front di Sahara Barat tentang pelanggaran HAM di kawasan Sahara Barat tersebut. Carne Ross, pendiri sekaligus direktur eksekutif Independent Diplomat mengidentifikasi dirinya sebagai mantan diplomat dan pakar ekonomi dengan organisasi yang terdiri dari mantan diplomat, advokat, dan pakar politik yang bekerja dalam organisasi non-pemerintah bernama Independent Diplomat.

Ketiga, peneliti menggunakan literatur berupa report tahunan dari Independent Diplomat. Report Tahunan tersebut berasal dari laporan kegiatan Independent Diplomat tahun 2014 sampai 2017.¹⁹ Laporan tahunan ini menunjukkan kinerja Independent Diplomat selama setahun penuh. Pada laporan tahunan Independent Diplomat tahun 2015, NGO ini menjelaskan cara mereka bekerja berdasarkan 3 pilar utama dari demokrasi modern, yaitu Political Strategy, International Law, dan Public Diplomacy. Political strategy adalah dengan mengatur strategi politik. Independent Diplomat bekerja berdasarkan strategi politik dari pengalaman anggotanya yang sebagian besar merupakan mantan diplomat. International Law dijadikan dasar bekerja Independent Diplomat karena Hukum Internasional merupakan kunci utama dalam strategi diplomatik. Diplomasi publik menjadi elemen penting dalam cara kerja Independent Diplomat. Melalui

¹⁹ Independent Diplomat, Independent Annual Report 2015 and 2016.

diplomasi publik, sangat perlu menciptakan citra positif melalui media sosial tentang kasus mereka dan klien yang mereka tangani. Pada report tahunan ini juga dijelaskan tentang kasus-kasus yang sedang mereka tangani dan kasus yang telah selesai dan hasil dari penyelesaian kasus tersebut.

Keempat, Peneliti menggunakan artikel jurnal berjudul “Multi-Decadal Shoreline Changes in Response to Sea Level Rise in Marshall Islands” yang ditulis oleh Murray Ford dan Paul S. Kench.²⁰ Artikel jurnal ini menyajikan data ilmiah tentang perubahan yang terjadi pada kondisi fisik negara Republik Kepulauan Marshall sebagai akibat dari perubahan iklim. Perubahan yang dirasa cukup signifikan adalah terjadi perubahan ujung vegetasi dari banyak pulau di Kepulauan Marshall, seperti Ebon, Wotho, Ujae, dll. Ujung vegetasi yang semakin hari semakin menjorok kedalam pulau menjadi dampak dari naiknya permukaan air di Kepulauan Marshall. Tulisan ini juga menyajikan data perubahan bentuk pulau-pulau karang yang mengalami perubahan setelah terkikis akibat erosi yang juga diakibatkan oleh permukaan air yang meningkat. Perubahan ujung vegetasi dan bentuk pulau karang juga memastikan perubahan terhadap bentuk garis pantai. Artikel jurnal ini memberi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan terhadap garis pantai, yaitu permukaan air yang meningkat, badai yang terjadi di wilayah pulau, kontrol lokal terhadap stabilitas pulau, dan dampak antropogenik.

Kelima, peneliti menggunakan buku yang berjudul “Independent Diplomat: Dispatches from an Untouchable Elite” oleh Carne Ross.²¹ Buku ini menjelaskan tentang pendirian Independent Diplomat oleh Executive Director Independent

²⁰ Murray R. Ford dan Paul S. Kench, “Multi-Decadal Shoreline Changes in Responce to Sea Level Rise in Marshall Islands,” *Anthropocene*, Vol 11, September 2015, Hal. 14-24

²¹ Daryl Copeland, Book Review of *Independent Diplomat: Dispatches from an Untouchable Elite*, *International Journal Autumn* 2007, Hal. 988-991

Diplomat sekarang, yaitu Carne Ross. Carne Ross mendirikan Independent Diplomat sebagai sebuah NGO yang bergerak dalam bidang penasihat diplomatik. Carne Ross mulai menginisiasi pembentukan Independent Diplomat setelah ia mengundurkan diri dari British Foreign Office. Sebelum mengundurkan diri, Carne Ross merupakan diplomat perwakilan Inggris di PBB di New York. Carne Ross mulai mengalami keraguan akan pekerjaannya saat masa kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dikeluarkan oleh Presiden George W. Bush, yaitu War on Terror. Kebijakan War On Terror ini menunjukkan bagaimana Amerika Serikat dan Inggris sebagai Aliansi melakukan invasi ke beberapa negara yang dianggap sebagai sarang teroris, seperti Irak dan Afghanistan. Amerika Serikat ditemani oleh Inggris pada masa War on Terror pernah melakukan serangan ke daerah di Irak yang dianggap memiliki Weapon Mass Destruction pada masa itu. Carne Ross mulai tidak setuju dengan kebijakan tersebut dengan menunjukkan beberapa bukti bahwa Irak tidak memiliki Weapon Mass Destruction seperti yang digambarkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan Inggris. Setelah itu, Carne Ross mulai menyadari bahwa diplomasi dalam ruangan yang dilakukan diplomat sebuah negara nyatanya memberikan dampak yang paling besar bukan kepada yang duduk di ruangan tersebut, melainkan kepada mereka yang menunggu hasil dari diplomasi. Hal ini membuat Carne Ross ingin membentuk sebuah konsep dimana Diplomat benar-benar menyampaikan kepentingan masyarakat di sebuah negara. Hal inilah yang menuntun lahirnya Independent Diplomat.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 *Non-Governmental Organization*

Non-Governmental Organization secara harfiah diartikan sebagai organisasi non-pemerintahan. Mengacu pada pengertian oleh PBB, NGO didefinisikan sebagai kelompok masyarakat berbasis kesukarelaan dan non-profit yang dikelola dalam level lokal maupun internasional dengan isu spesifik yang berbeda dalam setiap NGO tergantung pada kepentingannya dengan cara menyalurkan suara masyarakat kepada pemerintah, melakukan advokasi dan pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemangku kepentingan dan juga mendorong partisipasi politik yang aktif bagi masyarakat.²²

NGO telah mengalami perkembangan yang pesat dalam hal jumlah dalam skala global sejak 1960-an hingga memberikan persepsi bahwa NGO turut menjadi aktor utama dalam bidang ilmu hubungan internasional. Istilah NGO pertama kali digunakan oleh PBB pada tahun 1945 di konferensi pendirian PBB di San Francisco dengan mengundang 42 NGO sebagai pengakuan atas komitmen dan kontribusi dalam keadilan dan perdamaian.²³ NGO disebut dalam artikel 71 Piagam PBB sebagai tempat konsultasi dengan The Economic and Social Council.²⁴

Pada umumnya NGO memiliki lokasi pusat di kota-kota besar di negara-negara barat. Sebagian besar NGO didirikan atau memiliki markas utama di

²² *Definisi NGO*, <http://www.ngo.org/ngoinfo/define.html> (Diakses pada 22 November 2018)

²³ Shin-Wha Lee, "The Rise of NGO in International Relation," *Korea Observer* volume 31 no. 1 (Spring 2000): Hal. 105,

²⁴ United Nations, "United Nations Charter Article 71," <http://legal.un.org/repertory/art71.shtml> (Diakses pada 23 November 2018)

Washington, New York, dan Brussel.²⁵ Selain itu, NGO juga kerap membangun kantor di Swiss, terutama di kota Jenewa karena terdapat banyak organisasi antar-pemerintah yang terletak disana.

Dalam kajian hubungan internasional, NGO biasanya terlibat dalam isu HAM, lingkungan, bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan, perdamaian, dan isu keluarga. Selain itu, tidak menutup kemungkinan NGO untuk terlibat dalam isu-isu yang tidak biasa dilakukan, seperti pelucutan senjata dan pengawasan terhadap militer.²⁶

NGO sendiri mendapatkan sumber pendanaan untuk keberlangsungannya dari beberapa sumber, seperti lembaga donor lokal maupun internasional, lembaga pembangunan internasional, pemerintah negara lain, dan dana hasil kerja sama dengan NGO lain.²⁷ Meskipun berbasis non-profit, pendanaan dari beberapa pihak tetaplah dibutuhkan sebagai upaya untuk mempertahankan keberlangsungan dan eksistensi NGO tersebut.²⁸

1.7.2 *Transnational Advocacy Networks*

Advokasi bila diambil dari definisi secara etimologi merupakan sebuah kata yang diserap dari bahasa belanda, yaitu *advocaat* yang berarti pembela. Hal inilah yang membuat istilah advokasi sering dikaitkan dengan kegiatan pembelaan di pengadilan. Lebih luas, advokasi memiliki makna sebagai suatu upaya strategis yang terorganisir oleh individu atau kelompok untuk menyisipkan suatu isu

²⁵ Kerstin Martens, "NGOs and International Relations, UN," dalam buku *International Encyclopedia of Civil Society*, diedit oleh Stefan Toepler, (Berlin: Springer, 2009), 1043

²⁶ Kerstin Martens, "NGOs and International Relations, UN," Hal. 1041

²⁷United Nations, "United Nations Charter Article 71," Hal. 110

²⁸United Nations, "United Nations Charter Article 71," Hal. 110

kedalam agenda kebijakan dengan selalu mengawasi para pengambil keputusan untuk dapat memperoleh solusi atas isu dan permasalahan yang tersebut.²⁹

Dalam tulisan berjudul “Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics, Keck dan Sikkink menjelaskan tentang peran dan pengaruh lembaga advokasi dalam dunia perpolitikan dunia.³⁰ Tulisan ini dimulai dari penggambaran Keck dan Sikkink bahwa sejak akhir abad ke-20, dinamika perpolitikan dunia bukan hanya dipengaruhi dan dikuasai oleh negara sebagai aktor mainstream dalam politik internasional. Masa ini memunculkan aktor-aktor baru yang bersama dengan negara dan organisasi internasional, turut melibatkan diri dalam perpolitikan dunia. Interaksi perpolitikan dunia ini dinilai melibatkan aktor-aktor ekonomi dan firma-firma.

Salah satu aktor yang turut melibatkan diri dalam dinamika politik dunia adalah kelompok jaringan advokasi transnasional. Jaringan advokasi transnasional menurut Keck dan Sikkink bisa menjadi sesuatu yang memberikan kontribusi utama alam pertemuan norma-norma sosial dan politik yang dapat mendukung proses-proses integrasi regional maupun internasional. Jaringan advokasi internasional dianggap dapat membuka peluang berlipat untuk melakukan dialog dan pertukaran informasi dengan membangun relasi dengan aktor-aktor masyarakat sipil, negara, dan organisasi internasional.

Keck dan Sikkink memberikan pengertian jaringan advokasi transnasional dengan mengangkat pengertian dari jaringan transnasional yang dapat diartikan

²⁹ Sheila Espine-Villaluz, *Manual Advokasi Kebijakan Strategis*, (Jakarta: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 2004), Hal.5

³⁰ Margareth E. Keck dan Kathryn Sikkink, *Transnational Advocacy Network in International and Regional Politics*, (Oxford: Blackwell Publishers, 1999)

sebagai sebuah bentuk organisasi dengan karakteristik tertentu, seperti bersifat sukarela, timbal-balik, dan pola pertukaran informasi dan komunikasi yang horizontal. Penyebutan jaringan advokasi sendiri ialah karena para advokat yang melakukan pembelaan terhadap kasus tertentu dan mempertahankan ide atau permasalahan tertentu yang dialami suatu pihak. Singkatnya, Keck dan Sikkink mengartikan jaringan advokasi transnasional sebagai jaringan yang terdiri dari aktor-aktor yang terikat bersama oleh nilai-nilai bersama, wacana umum, dan pertukaran informasi dan pelayanan yang padat yang bekerja dalam ruang lingkup internasional dalam suatu isu. Isu-isu yang ditangani oleh jaringan ini biasanya memiliki nilai konten dan ketidakpastian informasi yang tinggi, walaupun nilai konten yang tinggi biasanya sebagai prasyarat dan hasil dari aktivitas jaringan advokasi itu sendiri. Perbedaan jaringan advokasi transnasional dengan jaringan transnasional lainnya adalah terdapat kemampuan aktor-aktor internasional non-tradisional untuk secara strategis melakukan mobilisasi informasi sehingga dapat menciptakan isu-isu baru, melakukan persuasi, penekanan, dan mendapatkan pengaruh dari pihak-pihak seperti organisasi dan pemerintah yang lebih kuat.

Selain itu, jaringan advokasi transnasional menggunakan nilai bersama sebagai fundamental aksi jaringan ini. Selain mengangkat nilai bersama, jaringan ini juga berusaha untuk mempromosikan implementasi norma dengan cara menekan aktor yang menjadi target mereka untuk mengangkat kebijakan-kebijakan baru. Apabila memungkinkan, mereka berusaha untuk memaksimalkan pengaruh mereka terhadap aktor target mereka.

Aktor-aktor utama dalam jaringan advokasi biasanya meliputi NGO yang bekerja secara domestik dan internasional, organisasi penelitian dan advokasi,

gerakan sosial lokal, yayasan; media, serikat dagang, organisasi konsumen, dan intelektual, bagian dari organisasi internasional dan antar-pemerintah, dan bagian dari cabang cabang eksekutif dan/atau parlemen dari pemerintah.

Meskipun Keck dan Sikkink memberikan tujuh contoh aktor yang bisa menjadi jaringan advokasi, namun penelitian awal keduanya memberikan penjelasan bahwa NGO, baik yang bekerja secara domestik maupun internasional yang memainkan peran yang sangat besar dalam melakukan advokasi. Peran yang sangat besar antara lain dengan melakukan inisiasi tindakan dan memberikan tekanan yang lebih kuat kepada aktor yang memiliki kekuatan lebih. Selain itu, yang membedakan antara NGO dengan *transnational advocacy networks* adalah kemampuan jaringan advokasi untuk membentuk jaringan dengan aktor-aktor lain yang beroperasi di lintas negara dalam proses advokasi dibandingkan dengan NGO yang cenderung untuk bekerja sendiri. Ketika NGO mampu melibatkan aktor lain dalam bentuk jaringan, maka posisi NGO akan berubah menjadi jaringan transnasional.

Jaringan advokasi transnasional, sebagaimana kelompok politik dan gerakan sosial lain, belum memiliki cukup kekuatan dalam politik internasional. Oleh karena itu, dalam proses bekerjanya, jaringan advokasi transnasional haruslah menggunakan kekuatan pengelolaan informasi dan strategi yang baik untuk memperoleh kekuatan tersebut. Strategi-strategi yang dijalankan oleh jaringan advokasi transnasional dalam proses aktivitasnya menurut Keck dan Sikkink antara lain, *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.

1. *Information Politics*

Strategi pertama ini adalah kemampuan untuk menggerakkan informasi politis yang berguna dan kredibel menuju ke tempat yang akan memiliki dampak yang besar. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Jaringan advokasi transnasional sebagai aktor non-negara masih belum memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar dalam aktivitas politik internasional. Oleh sebab itu, aktor non-negara meraih pengaruh dengan berperan sebagai pihak yang menyajikan sumber informasi. Aliran informasi dalam jaringan advokasi transnasional tidak hanya menyediakan fakta, namun juga kesaksian atau testimoni berupa cerita dari orang-orang atau pihak-pihak yang kehidupan mereka mengalami perubahan oleh jaringan advokasi transnasional tersebut.

Tujuan testimoni ini adalah sebagai sebuah bentuk persuasi bagi orang-orang untuk turut mengambil peran dan membantu dalam kasus yang mereka advokasikan. Pesan yang disampaikan berupa testimoni tersebut haruslah mengandung pesan yang kuat dan dapat memberi pengaruh dan dapat mempengaruhi orang-orang tentang bagaimana kasus yang sedang mereka ampu sangatlah penting untuk diperhatikan oleh masyarakat.

Dalam strategi *information politics* ini, media merupakan salah satu rekan kerja yang baik bagi jaringan advokasi transnasional. Media berperan untuk memberitakan jaringan advokasi transnasional dan kasus yang mereka ampu untuk mencapai jangkauan masyarakat yang lebih luas. Para jurnalis dan pekerja pers bisa jadi merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam memberitakan kabar yang benar sesuai kabar lapangan. Namun Keck

dan Sikkink menjelaskan bahwa para jurnalis tersebut sering mengemas berita tentang kasus advokasi oleh jaringan dengan dramatis untuk mengambil perhatian publik.

Proses advokasi dengan menggunakan strategi *information politics* dimulai dengan melakukan pengumpulan informasi. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data-data yang relevan tentang kasus dan klien yang diadvokasikan. Langkah berikutnya adalah dengan melakukan distribusi informasi. Jaringan advokasi melakukan distribusi informasi dengan mengemas informasi untuk disebarakan sehingga dapat diakses oleh media.

2. *Symbolic politics*

Strategi *Symbolic politics* ini adalah langkah yang digunakan jaringan advokasi untuk meraih perhatian publik dengan mengambil contoh simbol yang berkaitan dengan kasus yang sedang diadvokasikan oleh jaringan advokasi transnasional. Para aktivis jaringan advokasi tersebut menggambarkan isu tersebut dengan mengidentifikasi dan menyediakan penjelasan yang meyakinkan dari simbol-simbol tertentu dan akhirnya menjadi katalis dalam pertumbuhan jaringan advokasi tersebut.

Sebagai contoh, *symbolic politics* berhasil saat penganugerahan nobel di bidang perdamaian kepada Rigoberta Menchu di International Year of Indigenous People yang meningkatkan kesadaran publik tentang kondisi orang-orang pribumi di Amerika. Hal ini menjadi salah satu contoh bagaimana kejadian-kejadian atau simbol-simbol tertentu memberikan dampak terhadap kesadaran publik terhadap isu-isu tertentu.

3. *Leverage politics*

Strategi *leverage politics* adalah kemampuan untuk memanggil aktor-aktor yang memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk mempengaruhi situasi yang mana anggota jaringan advokasi yang memiliki kekuatan yang lebih lemah tidak dapat mempengaruhi situasi. Strategi ini digunakan oleh jaringan advokasi dengan melibatkan pihak yang sudah mempunyai nama dan pengaruh besar dalam politik untuk mempengaruhi proses advokasi saat anggota jaringan advokasi belum memiliki pengaruh yang kuat.

4. *Accountability politics*

Strategi ini merupakan upaya yang dilakukan jaringan advokasi untuk meyakinkan pemerintah dan aktor lainnya yang lebih memiliki pengaruh untuk mengubah posisi mereka dalam menyikapi sebuah isu. Ketika pemerintah dan aktor-aktor lain tersebut telah memberi sikap dan berkomitmen untuk memegang sikapnya sesuai nilai-nilai yang telah disepakati, jaringan advokasi menggunakan posisinya untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang akan dibuat pemerintah.

Strategi-strategi yang diidentifikasi oleh Keck dan Sikkink tersebut dapat digunakan sebagian atau seluruhnya dalam menjelaskan proses advokasi oleh jaringan advokasi transnasional secara bersamaan.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode Penelitian sosial adalah cara sistematis yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan

fenomena sosial yang ditelisknya.³¹ Metode penelitian berguna untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian secara sistematis sehingga dapat membantu dalam permasalahan yang diteliti dan mencari jawaban yang diharapkan.

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, menurut Gogdan dan Guba, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif.³² Jika dilihat berdasarkan caranya, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana menurut Usman dan Akbar, metode deskriptif adalah metode penelitian yang berupaya memberikan penggambaran fakta secara faktual sistematis, memaparkan data, dan informasi-informasi lainnya yang dapat menjawab pertanyaan penelitian.³³

1.8.2 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada tahun 2009 dimana tahun tersebut merupakan tahun pertama Independent Diplomat mengadvokasi diplomasi Kepulauan Marshall dalam menghadapi Copenhagen Climate Conference hingga tahun 2017 pasca event 2015 United Nations Climate Change Conference.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Tingkat analisis dan unit analisis dalam penelitian hubungan internasional harus ditentukan untuk kefokusannya dalam membahas permasalahan yang diangkat. Dengan menentukan objek tingkat analisis dan unit analisis, peneliti bisa memfokuskan dan terbimbing untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena Hubungan Internasional. Unit analisis yaitu perilaku objek yang menjadi landasan

³¹ Gumilar Rusliwa Soemantri, "Memahami Metode Kualitatif," *Makara, Sosil Humaniora*, Vol 9, no 2, Hal. 57

³² Lexi J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif," (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), Hal.6

³³ Purnomo Setiady Akbar dan Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) Hal. 42

keberlakuan pengetahuan yang digunakan, sedangkan unit eksplanasi adalah unit yang menjadi penjelas dari unit analisis.³⁴ Maka berdasarkan uraian diatas, unit analisis dalam penelitian ini adalah Independent Diplomat dengan unit Eksplanasi Republik Kepulauan Marshall. Tingkat analisis adalah sistem.

1.8.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dipahami sebagai tahapan yang dilakukan yaitu melakukan pencarian, penelusuran, dan pengumpulan dari sumber-sumber yang relevan dan berhubungan dengan penelitian. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dari situs resmi Independent Diplomat, yaitu www.independentdiplomat.org yang menyediakan informasi berupa kasus-kasus yang pernah ditangani, termasuk advokasi Republik Kepulauan Marshall dan laporan tahunan organisasi yang menyajikan informasi berupa perkembangan isu yang ditangani. Selain itu peneliti juga menggunakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku, artikel jurnal, majalah, publikasi dari hasil penelitian yang terdahulu, berita, serta informasi dari internet yang dianggap relevan.

1.8.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisis

Data yang telah diperoleh dari sumber-sumber relevan tersebut diklasifikasikan berdasarkan prosedur yang telah dirumuskan pada kajian konsep/teori. Proses analisis dilakukan dengan mengolah studi literatur terhadap strategi Independent Diplomat dalam mengadvokasi diplomasi Republik Kepulauan Marshall dengan menggunakan konsep *transnational advocacy network* seperti yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya.

³⁴ Joshua S. Goldstein, John C, Pevehouse, *Level of Analysis* (London: Pearson International Edition, International Relations, Eighth Edition, 2007) Hal. 17

Dalam proses analisis strategi yang digunakan oleh Independent Diplomat dalam mengadvokasi diplomasi Republik Kepulauan Marshall, peneliti menggunakan empat indikator yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya, yaitu, *Information politics*, *Symbolic politics*, *Leverage politics*, dan *Accountability politics*.

1.9 Sistematika Penulisan

Untuk koherensi tulisan agar mudah dipahami, penelitian ini disajikan dalam membagi pembahasan ke dalam lima bab, dimana masing-masing bab mengandung substansi sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi alasan peneliti tertarik untuk melihat peran Independent Diplomat dalam mengadvokasi Republik Kepulauan Marshall. Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori dan konsep, metodologi, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

Bab II: Independent Diplomat

Bab ini berisi penjelasan dan profil Independent Diplomat sebagai sebuah NGO yang terlibat dengan Republik Kepulauan Marshall.

Bab III: Republik Kepulauan Marshall dan UNFCCC

Bab ini berisi penjelasan tentang profil Republik Kepulauan Marshall dan kondisi negara dan perubahan iklim di negara tersebut. Bab ini juga berisi penjelasan tentang UNFCCC sebagai rezim perubahan iklim dunia dan peran yang dilakukan UNFCCC dalam usahanya untuk menangkal dampak perubahan iklim.

Bab IV: Strategi Independent Diplomat dalam Mengadvokasi Diplomasi Republik Kepulauan Marshall di *United Nations Climate Change Conference 2015*

Bab ini berisi tentang strategi yang digunakan Independent Diplomat dalam mengadvokasi Diplomasi Republik Kepulauan Marshall yang menghadapi dampak buruk akibat dari perubahan iklim dunia. Bab ini menjadi analisis peneliti dalam melihat bagaimana Kepulauan Marshall bisa menjadi *roleplayer* dalam konferensi perubahan iklim PBB 2015

Bab V: Penutup/Kesimpulan

Bab ini berisi ringkasan dari keseluruhan pembahasan dari hasil penelitian ini, sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini.

